

Kamis, 25 Agustus 2011

Penilaian Keuangan Disinyalir Tak Wajar

Ngabang, BERKAT.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar pada Kamis (18/8) lalu baru saja menyelesaikan tugasnya untuk memeriksa keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pembab) Landak. Hasilnya, ada beberapa rekomendasi sementara yang menjadi catatan Pembab Landak yang nantinya secara internal akan dibahas, dibicarakan dan ditanggapi oleh seluruh jajaran Pembab Landak. "Barangkali kita belum tahu apa opini penilaian yang kita terima tahun ini. Mungkin opini kita masih tidak wajar dikarenakan berbagai faktor," ujar Bupati Landak Adrianus Asia Sidot saat menanggapi Pendapat Akhir (PA) fraksi di DPRD Landak terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD

tahun 2010, Rabu (24/8) di ruang sidang DPRD Landak.

Dijelaskan Bupati, berbagai faktor tersebut diantaranya tindaklanjut dari laporan hasil pemeriksaan keuangan pada tahun sebelumnya. Pembab Landak belum sepenuhnya bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan BPK RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pembab Landak sendiri. "Kita baru saja membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). BPK RI memang merekomendasikan kerugian-kerugian Negara. Kerugian-kerugian Negara ini harus ditangani oleh tim TPTGR yang dibentuk oleh Bupati dan saat ini TPTGR sedang dalam penyempurnaan," kata Bupati.

Ia mengakui memang sangat sulit untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian-kerugian keuangan daerah dan kerugian-kerugian keuangan Negara. "Sebetulnya bisa saja kita dengan pemaksaan. Tapi saat ini kita memang masih meminta kesadaran untuk mengembalikan keuangan Negara yang dipakai. Tetapi seringkali ini diabaikan, sehingga nanti bisa direkomendasikan oleh TPTGR untuk melakukan proses hukum," ungkapnya. Ia menambahkan, sebetulnya Pemerintah sendiri sudah memberikan peluang dan kesempatan bagi siapa saja yang melakukan penyelewengan yang merugikan keuangan Negara untuk sepenuhnya ditangani secara informal melalui lembaga TPTGR ini. "Ini yang

akan segera kami fungsikan dalam menyikapi hasil-hasil temuan BPK. Sampai saat ini kita memang masih ada sisa-sisa temuan dari tahun 2001 sampai tahun 2008 yang belum selesai. Oleh karena itu saya sedikit pesimis kalau rapot kita naik tahun ini, walaupun saya sendiri sebetulnya sudah berusaha agar rapot ini bisa naik," kata calon Bupati Landak terpilih periode 2011-2016 ini.

Namun demikian kata Bupati, ada sisi yang menggembirakan dari tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diserahkan hari Senin lalu oleh BPK RI. "Landak ternyata menempati urutan ketiga setelah Kubu Raya dan Sambas dalam hal penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan atau rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK RI," ucap Bupati. (sh)